

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dalam melaksanakan segala bentuk kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, baik tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014 merupakan perwujudan pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa keberagaman yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa Membangun dan Membangun Desa.

Kewenangan penuh dimiliki oleh desa untuk mengelola kebutuhannya sendiri dan membangun desa. Untuk mengembangkan desanya sendiri masyarakat bekerja sama dengan pemerintah desa, lewat kewenangan yang dimiliki

pemerintah untuk membuat program-program. Desa mencari cara sendiri untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhannya. Dalam prinsip Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, dengan kata lain Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun Desa.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2010: 59-60).

Menurut Novian (2010) pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam

masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.

Perempuan merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu bangsa, perempuan mempunyai keinginan besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Salah satu buktinya bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan melakukan usaha-usaha mandiri dan salah satu wadah organisasi bagi perempuan adalah PKK. Di ranah kesehatan terdapat Posyandu yang didominasi oleh perempuan, dan di ranah pengetahuan terdapat Majelis Ta'lim.

Jumlah perempuan di Desa Salamnunggal lebih banyak daripada laki laki, yaitu 2.881 jiwa untuk jumlah perempuan dan 2.855 jiwa untuk jumlah laki-laki sedangkan jumlah perempuan yang memiliki hak pilih adalah 1858 jiwa dan jumlah laki-laki yang memiliki hak pilih adalah 1869 jiwa. Dengan jumlah demografi tersebut perempuan mempunyai peran penting dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan perempuan mempunyai suara yang sama dengan laki-laki. Namun jika dilihat dari keterlibatan perempuan seperti dalam BPD periode 2015-2019 di Desa Salamnunggal jumlah perempuan hanya satu orang dalam 8 anggota BPD.

Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur terdapat Organisasi PKK, Posyandu, Majelis Ta'lim dan beberapa Usaha Kecil Menengah. PKK di Desa Salamnunggal memiliki kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan terutama PKK dalam program atau kegiatan yang

dapat dilihat dari aspek keterlibatan, motivasi kontribusi dan tanggung jawab yang dapat dilihat dari tabel dibawah :

Tabel 1.1 Keadaan Objek Penelitian

NO	Objek Penelitian	Nama / Wilayah	Keterangan
1.	PKK	Desa Salamnunggal	Kurang Aktif
2.	POSYANDU	1. Durian 2. Jambu 3. Delima 4. Rambutan 5. Menteng 6. Jeruk 7. Dukuh	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
3.	Majlis Ta'lim	1. Al-Mansuri 2. Al-Barokah 3. Ar-Rohmah 4. At-Taufiq 5. Al-Ikhlas	Aktif Aktif Aktif Aktif Kurang Aktif
4.	UKM (menjahit)	1. Kp. Pasir Gede 2. Kp. Cijolang 3. Kp. Cigandasuta 4. Kp. Cidadap 5. Kp. Lembur Tengah	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa Posyandu, Majlis Ta'lim dan UKM adalah aktif. Tetapi dalam hal keasripan dan laporan pada pemerintah desa belum berjalan dengan lancar .

B. Identifikasi Masalah / Fokus Masalah

Fokus masalah yang akan dijadikan penelitian oleh penulis adalah Pemberdayaan perempuan yang terhimpun dalam beberapa wadah diantaranya PKK, Posyandu, Majlis Ta'lim dan Usaha Kecil menengah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterlibatan Kader PKK, Anggota Posyandu, Jama'ah Majelis Ta'lim dan Pelaku UKM dalam Pembangunan Desa di Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur ?
2. Apa yang diharapkan Pemerintah Desa terhadap keterlibatan kader PKK, anggota Posyandu, Jama'AH Majelis Ta'lim dan Pelaku UKM, dan harapan stake holder dari pemerintah desa ?
3. Bagaimana Kendala yang dialami oleh Kader PKK, Anggota Posyandu, Jama'ah Majelis Ta'lim dan Pelaku UKM dalam keterlibatan Pembangunan Desa ?

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pembangunan desa, dan membantu pemerintah desa untuk mengetahui kendala yang dialami perempuan dalam keikutsertaan pembangunan desa.

E. Manfaat Dan Kegunaan

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pengembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan

2. Secara Praktis

Penulis berharap manfaat dari penelitian ini dapat membantu pemerintah Desa Salammunggal mengenai keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan kendala apa saja yang dihadapi perempuan dalam keikutsertaan meningkatkan pembangunan Desa. Adapun untuk Kader PKK, Anggota Posyandu, Jama'ah Majlis Ta'lim dan Pelaku UKM dapat memberi informasi apa saja yang diharapkan dari pemerintah desa terhadap mereka.

F. Kerangka Pemikiran

Kartasasmita dikutip Totok Mardikanto (2015:163) “Pemberdayaan Masyarakat” “ pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan. tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri”

Maka dari itu konsep pemberdayaan harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

1. terarah (targeted). Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya yang sesuai dengan kebutuhan.
2. langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. upaya ini efektif dilakukan karena disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
3. menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat sulit untuk dapat memecahkan masalah masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu, pendekatan kelompok ini sangat efektif dan efisien untuk dilakukan.

Gambar 1.2 Kerangka Pemikir

Konsep pemberdayaan Kartasasmita
dikutif Totok Mardikanto
(2015:163) dalam buku
“Pemberdayaan Masyarakat”



1. upaya harus terarah (targeted).
2. Mengikut sertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat
3. menggunakan pendekatan kelompok

Kartasmita dikutip Totok Mardikanto (2015:163) dalam buku “Pemberdayaan Masyarakat”





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG